



**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Ririn Bella Silvia

NIM 7111415098

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 02 Oktober 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan


Fafurida, S.E., M.Sc.
NIP. 198502162008122004

Pembimbing



Yozi Aulia Rahman, SE., M.Sc
NIP. 198701222014041001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 Oktober 2019

Penguji I



Karsinah, S.E., M.Si.
NIP. 197010142009122001

Penguji II



Diky Aji Suseno, S.E., M.Si.
NIP. 197612032003121004

Penguji III



Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc.
NIP. 198701222014041001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi



Fandi Harti Yanto, MBA, Ph.D.
NIP. 196307181987021001

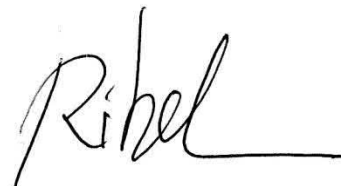
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ririn Bella Silvia
NIM : 7111415098
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 13 September 1997
Alamat : Banaran RT04/RW04 Gang Kenanga No.43,
Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kota
Semarang

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 02 Oktober 2019



Ririn Bella Silvia

NIM 7111415098

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutinya. (Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah)
2. Orang-orang sukses yang telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak. (Aldeus Huxley)
3. Seseorang yang bertindak tanpa ilmu ibarat berpergian tanpa petunjuk. Dan sudah banyak yang tahu kalau orang seperti itu sekiranya akan hancur, bukan selamat. (Hasan Al-Basri).

PERSEMBAHAN

1. Ibu, Bapak dan adek saya tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'a
2. Almamater Universitas Negeri Semarang

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah” yang mana penelitian ini merupakan bagian dari penelitian payung yang berjudul “Model Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah Melalui Pendekatan *Potential Matrix*” Dalam proses penyusunan skripsi ini diselesaikan dengan baik dan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dengan segala kebijakannya.
2. Drs. Heri Yanto MBA, PhD, Dekan Fakultas Ekonomi Univrsitas Negeri Semarang dengan segala kebijakan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi dengan baik.
3. Fafurida, S.E., M.Sc, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Univrsitas Negeri Semarang.
4. Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc, dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, waktu, dan motivasi selama pengerjaan skripsi.
5. Karsinah, S.E., M.Si dosen Penguji I, Bapak Deky Aji Suseno, S.E., M.Si dosen Penguji II, dan Bapak Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc penguji III

serta pembimbing yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi.

6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pengarahan, motivasi, dan masukan yang bermanfaat selama menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.
7. Bapak Mukibin dan Ibu Musiami, kedua orangtua yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk material, dan spiritual sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Ekonomi Pembangunan 2015 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, jika terdapat kritik atau saran sangat membangun penulis akan senang hati menerima. Semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu dan manfaat bagi pembaca.

Semarang, 2 Oktober 2019

Penulis

SARI

Silvia, Ririn Bella. 2019. "Analisis Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah." Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Potensi Pajak Daerah, Proyeksi Pajak Daerah

Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah menjadi peranan yang cukup besar dalam periode tahun 2013-2018. Namun kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD mengalami fluktuatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, menggali potensi Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, mengetahui proyeksi Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah enam tahun kedepan, dan pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan rasio tingkat kontribusi terhadap PAD, efektifitas pajak daerah dan pertumbuhan pajak daerah. Rasio kontribusi dan pertumbuhan untuk mengkategorikan tipologi penerimaan pajak daerah, metode kuadrat terkecil digunakan untuk proyeksi penerimaan pajak daerah, metode regresi data panel digunakan untuk menganalisis pengaruh PDRB dan Jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi agregat pajak daerah masuk dalam kategori sangat baik terhadap PAD yaitu dengan rata-rata sebesar 83,47%. Pertumbuhan agregat pajak daerah dengan rata-rata 12,94% pertahun. Efektifitas agregat pajak daerah masuk dalam kategori sangat efektif dengan rata-rata 100,7%. Kemudian berdasarkan rasio efektifitas dan pertumbuhan dapat disimpulkan bahwa yang termasuk dalam kategori prima yaitu pajak kendaraan bermotor, kategori potensial yaitu bea balik kendaraan bermotor, kategori berkembang yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok, kategori terbelakang yaitu pajak air permukaan. Proyeksi agregat pajak daerah dan sektor pajak daerah tahun 2019-2023 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari setiap jenis pajak daerah agar mengalami peningkatan penerimaan pajak daerah yaitu dengan melakukan perhitungan potensi setiap jenis pajak daerah, perlu diidentifikasi karena ada beberapa potensi pajak daerah provinsi yang belum dikelola secara tepat, serta perlu adanya pengawasan yang belum efektif oleh pemerintah sehingga dalam pemungutan pajak dapat maksimal.

ABSTRAK

Silvia, Ririn Bella. 2019. " Analysis of Tax Revenue Central Java Province." Thesis. Department of Economic Development. Faculty of Economics, University of Semarang. Supervisor Yozi Aulia Rahman, SE, M.Sc.

Keywords: Local Tax, Tax Potential of Regional, Local Tax Projections

Keywords: Local Tax, Tax Potential of Regional, Local Tax Projections

Local Tax Revenue to Local Revenue in Central Java province became a significant role in the period of 2013-2018. However, the contribution of Local Taxes to PAD experiencing fluctuating. This study aims to determine and analyze the performance of the Management Board of Revenue in tax revenue Java Province, to explore the potential of Central Java Province Local Tax, Tax projections knowing Java Province six years in the future, and influence the GDP and population of the Local Tax.

The method used in this study is the calculation of the ratio of contributions to the PAD, the effectiveness of local taxes and tax growth daerah. The ratio of contribution and growth to categorize typology of local tax revenue, the least squares method is used for local tax revenue projections, panel data regression methods were used to analyze the influence of the GDP and the total population of the local tax revenue.

The results showed that the aggregate contribution of local taxes in the category very well against the original income that is with an average of 83.47%. Aggregate growth of local taxes by an average of 12.94% every year. Efektifitas aggregate local taxes in the category very effective with an average of 100.7%. Then, based on the ratio of the effectiveness and growth can be concluded it is primary namely motor includes vehicle motor tax, a potential category ie customs behind a motor vehicle, namely the growing category of motor vehicle fuel tax and tobacco tax, which is a tax underdeveloped category of surface water. Projected aggregate local taxes and sector local taxes, year 2019-2023 always increase every year. Variable PDRB influential significantly to local tax revenue district / city in Central Java province, while a variable number of the population is not significantly influence local tax revenue district / city in Central Java province.

Need do intensification and extension of the income of every type of local taxes in order to increase local tax revenues by performing the calculation of the potential of each type of local taxes, need to be identified because there are some tax potential of the provinces that have not managed appropriately, as well as the need for supervision ineffective government resulting in tax collection can be maximized.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iy
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SARI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Cakupan Masalah.....	9
1.4 Perumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Kegunaan Penelitian	11
1.7 Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS.....	14
2.1 Kajian Teori Utama (<i>Grand Theory</i>).....	14
2.1.1 Teori Kebijakan Fiskal	14
2.1.2 Desentralisasi Fiskal	15
2.1.3 Otonomi Daerah	17
2.1.4 Pembangunan Daerah	18
2.1.5 Perpajakan	19
2.1.6 Pajak Daerah.....	21
2.1.7 Pendapatan Asli Daerah.....	28

2.1.8 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	31
2.1.9 Penduduk	33
2.2 Kajian Variabel Penelitian	34
2.2.1 Kinerja Penerimaan Pajak Daerah	34
2.2.2 Potensi Pendapatan Daerah	36
2.2.3 Proyeksi Pajak Daerah	38
2.2.4 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah	39
2.2.5 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah	40
2.3 Penelitian Terdahulu	41
2.4 Kerangka Berpikir	55
2.5 Hipotesis Penelitian	56
BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1 Jenis Penelitian	58
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	58
3.2.1 Variabel Penelitian	58
3.2.2 Definisi Operasional Variabel	59
3.3 Jenis dan Sumber Data	60
3.4 Metode Pengumpulan Data	61
3.5 Metode Analisa Data	62
3.5.1 Kontribusi Pajak Daerah	62
3.5.2 Analisis Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah	63
3.5.3 Analisis Efektifitas Pajak Daerah	64
3.5.4 Matriks Potensi	65
3.5.5 Analisis Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah	66
3.5.6 Analisis Regresi Data Panel	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
4.1 Hasil Penelitian	79
4.1.1 Kinerja Bappenda dalam Penerimaan Pajak Daerah	79
4.1.2 Tipologi Penerimaan Pajak Daerah	90
4.1.3 Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah	91

4.1.4 Analisis Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah	101
4.2 Pembahasan	109
4.2.1 Kinerja Bappenda Dalam Penerimaan Pajak Daerah	109
4.2.2 Tipologi Penerimaan Potensi Pajak Daerah	116
4.2.3 Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah	117
4.2.4 Analisis Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap penerimaan pajak daerah	119
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	122
5.1 Kesimpulan	122
1.2 Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1Pendapatan Daerah Provinsi di Pulau Jawa (dalam jutaan) Tahun 2011-2017	3
Tabel 1. 2Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Dalam Rupiah).....	4
Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	41
Tabel 3. 1 Kriteria Kontribusi Pajak Daerah.....	63
Tabel 3. 2 Kriteria Efektifitas.....	64
Tabel 4. 1 Kontribusi Agregat Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (dalam rupiah).....	79
Tabel 4. 2 Pertumbuhan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (dalam rupiah).....	81
Tabel 4. 3 Efektifitas Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (dalam rupiah).....	83
Tabel 4. 4 Tingkat Kontribusi Per Jenis Pajak Daerah terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018	85
Tabel 4. 5 Pertumbuhan Per Jenis Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018	87
Tabel 4. 6Tingkat Efektifitas Per Jenis Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018	89
Tabel 4. 7 Tipologi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018	90
Tabel 4. 8 Proyeksi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (dalam rupiah)	92
Tabel 4. 9 Proyeksi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (dalam rupiah)	93
Tabel 4. 10 Proyeksi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (dalam rupiah).....	95
Tabel 4. 11 Proyeksi Penerimaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (dalam rupiah)	97

Tabel 4. 12 Proyeksi Penerimaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (dalam rupiah)	98
Tabel 4. 13 Proyeksi Penerimaan Pajak Rokok di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (dalam rupiah)	100
Tabel 4. 14 Uji Chow	102
Tabel 4. 15 Uji Hausman	103
Tabel 4. 16 <i>Fixed Effect Model</i>	103
Tabel 4. 17 Uji Multikolinearitas	105
Tabel 4. 18 Uji Heteroskedastisitas.....	106
Tabel 4. 19 Koefisien Determinasi.....	106
Tabel 4. 20 Nilai Probabilitas (F-Statistik)	107
Tabel 4. 21 Tabel Probabilitas (T-Statistik).....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1Tingkat Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018.....	5
Gambar 2.1Kerangka Bepikir	56
Gambar 4. 1 Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.....	80
Gambar 4. 2 Pertumbuhan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018	82
Gambar 4. 3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.....	83
Gambar 4. 4 Kontribusi Per Jenis Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.....	86
Gambar 4. 5Pertumbuhan Per Jenis Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.....	88
Gambar 4. 6 Proyeksi Agregat Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018	93
Gambar 4. 7 Proyeksi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.....	95
Gambar 4. 8 Proyeksi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.....	96
Gambar 4. 9 Proyeksi Pajak Air Permukaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018	99
Gambar 4. 10 Proyeksi Pajak Rokok Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018	101
Gambar 4. 11 Matriks Potensi Pajak Daerah	117

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Observasi ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	130
Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Observasi ke Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu.....	131
Lampiran 3. Surat Balasan dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	132
Lampiran 4. Surat Balasan dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	134
Lampiran 5. List Data Yang Dibutuhkan.....	135
Lampiran 6. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018	135
Lampiran 7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.....	136
Lampiran 8. Anggaran dan Realisasi Per Jenis Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.....	137
Lampiran 9. Tingkat Kontribusi Agregat Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018	139
Lampiran 10. Tingkat Kontribusi Per Jenis Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018	139
Lampiran 11. Pertumbuhan Agregat Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018	140
Lampiran 12. Pertumbuhan Per Jenis Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018	140
Lampiran 13. Tingkat Efektifitas Agregat Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018	141
Lampiran 14. Tingkat Efektifitas Per Jenis Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018	141
Lampiran 15. Data Penelitian Regresi Data Panel (Pajak Daerah dan PDRB dalam rupiah, Jumlah Penduduk dalam jiwa).....	142
Lampiran 16. Output Log <i>Common Effect Model</i> (CEM)	148

Lampiran 17. Output Log <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	148
Lampiran 18. Output <i>Random Effect Model</i> (REM)	149
Lampiran 19. Output Log Uji Chow	150
Lampiran 20. Output Uji Hausman	151
Lampiran 21. Log Uji Multikol	152
Lampiran 22. Log Heteroskedastisitas	152

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Caprioli (2015), isu yang krusial dalam kajian makroekonomi yaitu mengenai cara pemerintah memungut penerimaan yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Pemungutan pajak tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat akan tetapi dilakukan juga oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah baik pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk mengelola daerahnya yang berhubungan dengan urusan administrasi dan fiskal. Oleh karena itu, dengan adanya wewenang yang diberikan oleh pemerintah daerah diharapkan setiap masing-masing daerah dapat memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki agar dapat mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan asas desentralisasi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat dan kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan pemberian bagi hasil atau dana perimbangan (Khusaini, 2006).

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada tingkat nasional maupun daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan yang dilakukan oleh daerah merupakan bagian dari pembangunan masyarakat. Sedangkan pembangunan daerah diupayakan untuk

mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerahnya, sehingga masyarakat dapat menjadi penopang dalam pengembangan potensi untuk meningkatkan perkembangan di bidang ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Sejak adanya otonomi daerah, kesejahteraan masyarakat bergantung pada pemerintah daerah, sehingga pemerintah harus lebih menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara maksimal. Pendapatan asli Daerah merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah dalam membiayai kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah, dengan demikian maka pemerintah dapat dikatakan berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Besarnya pajak daerah sekaligus memberikan gambaran kemandirian fiskal daerah. Semakin mandiri di setiap daerah dalam mendanai fungsi-fungsi pemerintahan daerah, maka daerah tersebut sudah tidak lagi bergantung dengan pendanaan dari pemerintah pusat.

Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota, dengan penyerahan sejumlah kewenangan pembiayaan dimana salah satu komponen utamanya berupa penerimaan pajak yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Riduansyah, 2003). Pembangunan daerah mengimplementasikan sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Berikut merupakan tabel pendapatan Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia tahun 2013-2018:

Tabel 1. 1Pendapatan Daerah Provinsi di Pulau Jawa (dalam jutaan) Tahun 2013-2018

Tahun	Provinsi					
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Banten	DI Yogyakarta
2013	41.525.337	19.237.611	13.343.358	17.411.309	5.718.701	2.286.855
2014	64.715.735	19.907.973	13.737.158	17.411.309	6.878.972	3.100.198
2015	44.209.238	24.009.980	16.828.153	22.228.450	7.328.220	3.400.014
2016	59.004.784	26.806.857	22.026.201	22.663.137	8.005.287	3.921.068
2017	62.466.130	30.540.901	23.467.518	27.932.994	9.790.923	4.988.379
2018	66.029.983	31.961.201	24.413.659	29.024.306	10.365.616	5.182.969

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa pendapatan daerah Provinsi di Pulau Jawa setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pendapatan Daerah tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta, diikuti dengan Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan DI Yogyakarta. Jawa Tengah, Banten dan DI Yogyakarta merupakan 3 provinsi yang memiliki pendapatan daerah terendah di Provinsi Pulau Jawa, akan tetapi Banten dan DI Yogyakarta memiliki wilayah yang tidak cukup luas dibandingkan dengan Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki wilayah yang luas di Pulau Jawa, namun memiliki pendapatan daerah terendah dibandingkan dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Jawa Tengah memiliki 35 Kabupaten/Kota, dibandingkan dengan Jawa Barat yang hanya memiliki 27 Kabupaten/Kota. Oleh

karena itu, pendapatan daerah di Jawa Tengah masih tergolong rendah dan perlu untuk memaksimalkan potensi penerimaan pendapat daerahnya.

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi Indonesia adalah masih tingginya angka ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Adanya ketergantungan fiskal yang tinggi, kemampuan daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangannya menjadi terkendala.

Pemerintah daerah dalam memaksimalkan otonomi daerah serta meningkatkan pembangunan dan mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-Undang 33 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyebutkan bahwa Pendapatan asli Daerah terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Berikut ini dijelaskan tabel data realisasi sumber Pendapatan Asli Daerah tahun 2013-2018:

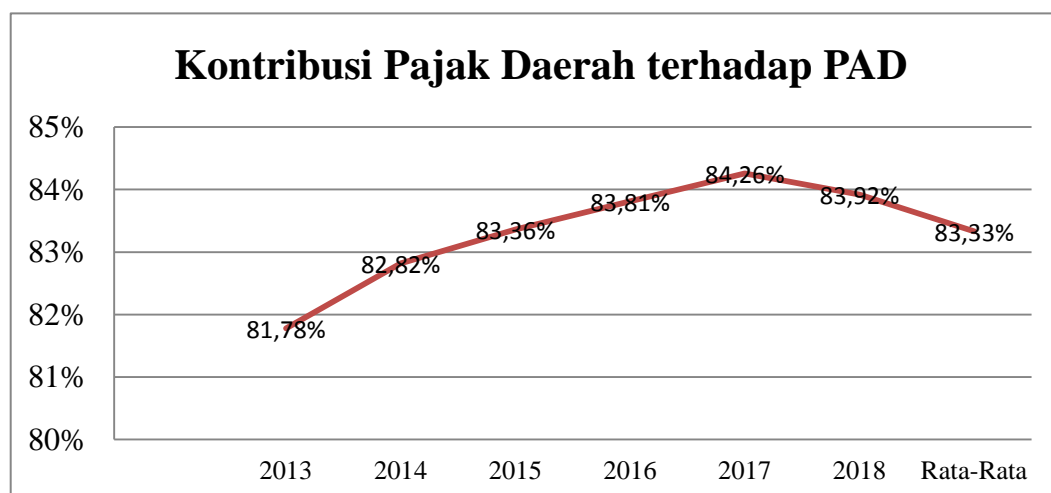
Tabel 1. 2Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (dalam rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Total PAD
2012	5.590.597.156.499	68.250.252.455	238.231.932.823	732.228.668.879	6.629.308.010.656

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Total PAD
2013	6.716.170.095.198	69.970.595.550	263.267.978.393	1.163.391.971.747	8.212.800.640.888
2014	8.213.117.977.920	79.460.952.663	291.844.276.152	1.331.935.024.697	9.916.358.231.432
2015	9.090.677.397.011	95.871.359.549	320.604.409.928	1.397.672.646.016	10.904.825.812.504
2016	9.672.518.189.424	106.225.058.566	340.397.111.367	1.421.889.360.952	11.541.029.720.309
2017	10.572.698.332.610	107.372.397.279	371.072.481.501	1.496.370.178.010	12.547.513.389.400
2018	11.507.119.643.262	104.957.567.382	459.626.767.964	1.640.028.789.690	13.711.732.768.298

Sumber : Data BAPPENDA Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel 1.2, dapat dilihat data realisasi Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah menjadi penerimaan yang memiliki kontribusi sangat tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sumber penerimaan dari Retribusi Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki persentase yang jauh lebih kecil, namun peranan tersebut tidak kalah penting dalam mendorong besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa kontribusi Pajak Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut ini disajikan tabel kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Tingkat Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

Sumber: Data Olahan peneliti

Periode tahun 2013-2018, penerimaan Pajak Daerah menjadi peranan yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Pada tabel gambar 1.1 dapat diketahui bahwa rata-rata kontribusi pajak Daerah pertahunnya sebesar 83,33% per tahun. Dapat dilihat kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan asli Daerah dari tahun 2013-2018 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013 Pajak Daerah memberikan kontribusi sebesar 81,78%. Kemudian pada tahun 2014-2017 kontribusi Pajak Daerah kembali mengalami kenaikan hingga 84,26% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi 83,92%.

Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Jawa Tengah menjadi penyumbang terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD mengalami fluktuatif. Adanya fenomena tersebut pemerintah daerah belum maksimal dalam menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga perlu adanya pemecahan masalah dengan menganalisis kinerja Bappenda dalam penerimaan pajak daerah, potensi pajak daerah serta proyeksi pajak daerah di masa yang akan datang.

Pajak Daerah menjadi indikator terpenting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah guna untuk membiayai pelaksanaan pemerintah serta pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa:

”Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.”

Upaya efektifitas yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menggali potensi yang ada pada pajak daerah. Efektifitas bertujuan untuk mengetahui keberhasilan atau tidaknya suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2004:134). Dikatakan efektif yaitu apabila suatu perusahaan atau organisasi mencapai tujuannya. Begitupun sebaliknya, organisasi atau perusahaan dikatakan tidak efektif apabila tidak dapat mencapai tujuannya. Tingkat efektifitas Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah dihitung berdasarkan target yang telah ditentukan. Semakin besar tingkat efektifitas Pajak Daerah, dapat dikatakan kinerja pemerintah aparat pajak telah efektif dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah, begitupun sebaliknya. Adanya hal tersebut diperlukan adanya persiapan yang matang untuk membuat besarnya pendapatan dan efektifitas penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu upaya pemerintah yakni melalui subjek dan objek pendapatan daerah, dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Kewenangan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah dipegang oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Penelitian Riduansyah (2003), menunjukkan bahwa kontribusi dari pajak dan retribusi daerah menunjukkan hasil yang signifikan terhadap PAD dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993/1994-2000 dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan untuk pembiayaan dan pembangunan pada suatu daerah. Dalam meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD maka perlu dilakukan intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah, kemudian dilakukan estensifikasi dengan memberlakukan jenis pajak daerah sesuai dengan kondisi daerah dan potensi daerah (Riduansyah, 2003).

Penelitian Arianto (2014), menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Variabel jumlah penduduk ini sebagai subjek pajak akan mengeluarkan penghasilannya untuk membayar pungutan pajak atas jasa timbal balik terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Variabel PDRB merupakan indikator dalam mengukur tingkat perekonomian suatu daerah dalam peningkatan penerimaan pajak daerah.

Kondisi yang dialami oleh pemerintah daerah di Jawa Tengah tentunya dibutuhkan suatu upaya ekstra untuk memaksimalkan segala macam potensi yang ada di daerah yang dapat digunakan untuk mendorong PAD melalui pajak daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dengan menganalisis potensi pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah secara lebih baik dan lebih jelas sehingga dapat dimaksimalkan dalam mendorong peningkatan dalam PAD.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah adalah pajak daerah menjadi kontribusi yang sangat tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Namun jika dilihat pertahunnya, kontribusi Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah mengalami *fluktuatif*.

1.3 Cakupan Masalah

Cakupan dalam penelitian ini yaitu variabel yang digunakan dan jenis-jenis pajak. Variabel yang digunakan adalah kontribusi per jenis pajak daerah terhadap PAD, tingkat pertumbuhan pajak daerah, efektifitas pajak daerah, proyeksi pajak daerah di Jawa Tengah, Pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah

Jenis Pajak Daerah dalam penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, Indonesia telah melaksanakan otonomi daerah yakni dengan adanya asas desentralisasi fiskal. Berdasarkan asas desentralisasi fiskal maka daerah diberikan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat untuk memungut pajak daerah dan pemberian bagi hasil atau dana perimbangan. Kebijakan dalam desentralisasi fiskal ini yakni untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dapat memaksimalkan sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi daerah yang ada. Dengan adanya permasalahan tersebut maka disimpulkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018?
2. Bagaimana tipologi penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018?
3. Bagaimana proyeksi Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 6 tahun yang akan datang?
4. Bagaimana Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018.
2. Tipologi penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Proyeksi Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah di 6 tahun yang akan datang.
4. Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah.

1.6 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat luas sebagai referensi dalam yang dapat dilakukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan memberikan wawasan terkait pajak daerah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan instansi pemerintah yang berkaitan dengan pemungutan pajak daerah yaitu dapat memberikan informasi referensi yang bertujuan untuk dapat mengembangkan penerimaan pajak daerah dalam peningkatan PAD sehingga dapat berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah.
- b. Bagi akademis dan peneliti diharapkan dapat memberikan masukan atau pemikiran dalam mengembangkan potensi pajak daerah.

1.7 Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu dan mempunyai karakteristik yang relatif sama. Penelitian ini mengenai potensi dan

proyeksi Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian yang terkait dan hampir sama dengan kinerja pajak daerah (Kontribusi, Pertumbuhan dan Efektifitas Pajak Daerah) antara lain yaitu Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor) (Mohammad Riduansyah, 2003), Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu (Baihaqi, 2011), Analisis Potensi Pajak Daerah dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Rokan Hulu (Nurhayati, 2015), Analisis Potensi Pajak Daerah untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara (Sherly Ering dkk, 2017), Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Adi Sulistiyanto, 2018).

Kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dan Sherly dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menganalisis potensi pajak daerah, sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada lokasi penelitian yaitu di Provinsi Jawa Tengah, data tahun dalam penelitian, serta model pengembangan potensi pajak daerah melalui tipologi penerimaan pajak daerah. Sedangkan penelitian Adi Sulistiyanto sama menganalisis pajak daerah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada data tahun penelitian serta tipologi penerimaan pajak daerah dan Proyeksi Pajak Daerah.

Berdasarkan dengan penjelasan di atas, walaupun ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan potensi pajak daerah dalam penelitian skripsi, namun tetap

berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, topik ini benar-benar penelitian yang asli dilakukan oleh peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Teori Utama (*Grand Theory*)

2.1.1 Teori Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola/mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran (belanja) dan pendapatan (pajak). Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran pemerintah (Amiruddin, 2018:152).

Kebijakan fiskal umumnya mempresentasikan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja dan jumlah pendapatan, yang secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Berbagai pilihan tersebut dalam tataran praktisnya diwujudkan melalui anggaran pemerintah yang di tingkat provinsi lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Secara ekonomi, pajak dapat didefinisikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada disektor rumah tangga dan perusahaan (dunia usaha) ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib memberi balas jasa langsung. Jika, pungutan pemerintah sifatnya memberi balas jasa langsung, maka pungutan tersebut disebut retribusi (Budiarto: 2008).

2.1.2 Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemberian otonomi pada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Menurut Sidik Machfud (2001), desentralisasi fiskal adalah suatu alat untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Menurut Saragih (2003: 83) desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Menurut (Kuncoro, 2014) desentralisasi fiskal berpijak kepada 3 (tiga) asas desentralisasi, yaitu dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantu.

Hubungan keuangan pusat ke daerah didasarkan pada 4 prinsip, yaitu :

1. Urusan tugas pemerintah pusat di daerah mengenai dekonsentrasi yang pembiayaannya berasal dari APBN.
2. Urusan tugas pemerintah daerah mengenai desentralisasi yang pembiayaannya berasal dari APBD.
3. Urusan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah mengenai tugas pembantu yang pembiayaannya oleh pemerintah pusat atas beban APBN dan pembiayaannya oleh pemerintah daerah atas beban APBD selaku pihak yang menugaskan.
4. Pemerintah pusat memberikan sumbangan apabila sumber keuangan daerah belum tercukupi.

Perimbangan keuangan yang mencakup pembagian keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilakukan secara adil, demokratis, proposional, dan transparan dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan kebutuhan setiap daerah. Pada hakekatnya pemerintah memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu; distribusi, stabilisasi, dan alokasi. Pada fungsi distirbusi dan stabilisasi akan lebih tepat dan efektif dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pada fungsi alokasi, dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena lebih mengetahui tantang kondisi, situasi, dan kebutuhan daerahnya.

2.1.3 Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan kewenangan dan kewajiban dari daerah untuk mengatur dan mengurus suatu kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemberian otonomi pada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah, sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada

daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.4 Pembangunan Daerah

Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan karakteristik daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan pada tumbuhnya inisiatif dan kreatifitas dari daerah dalam proses pembangunan (Munir,2002).

Katz (1971) berpendapat bahwa pembangunan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang lebih tinggi (dalam Tjokrowinoto, 1987: 3). Esman (1991) menyatakan bahwa hakikat dari pembangunan adalah kemajuan yang mantap dan terus-menerus menuju perbaikan kondisi kehidupan manusia (dalam Tjokrowinoto, 1996: 91), sedangkan Todaro (1986) mengemukakan bahwa pembangunan merupakan proses menuju perbaikan taraf kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan bersifat dinamis.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat dirangkum bahwa pembangunan daerah adalah proses perubahan terencana yang sesuai dengan kekhasan karakteristik, aspirasi, dan kreatifitas daerah, meliputi seluruh bidang/fungsi yang diserahkan kepada daerah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan menggunakan potensi sumberdaya yang dimilikinya dalam kerangka otonomi daerah.

2.1.5 Perpajakan

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya Mardiasmo (2016:1) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan menurut Mukhlis (2012:12) pajak merupakan transfer sumber dari sektor privat ke sektor publik dan pihak yang dikenakan pajak tidak menerima manfaat tertentu secara langsung, pajak ini ditujukan untuk memenuhi tujuan ekonomi dan sosial suatu bangsa.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu iuran atau kontribusi berupa uang yang ditujukan oleh orang pribadi atau

badan yang sudah mempunyai penghasilan tanpa ada imbalan berdasarkan undang-undang dan dibayarkan kepada pemerintah dengan tujuan untuk membiayai keperluan negara yang mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan fungsi pajak, menurut Mardiasmo (2016:4), terdiri dari 1) Fungsi Anggaran (*budgetair*) yaitu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah, 2) Fungsi Mengatur (*Rengulerend*) yaitu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

Menurut Mardiasmo (2016:7-8), pengelompokan pajak dibagi menjadi 3 yaitu berdasarkan golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutannya. Menurut golongannya, terdiri dari: 1) Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib Pajak dan tidak dilimpahkan kepada orang lain, 2) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain. Menurut sifatnya, pajak terdiri dari 1) Pajak subjektif yaitu pajak yang berdasarkan subjeknya atau keadaan Wajib pajak, 2) Pajak Objektif yaitu pajak yang tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Sedangkan Menurut Lembaga Pemungutannya, terdiri dari 1) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, 2) Pajak Daerah yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

2.1.6 Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, didalamnya menyebutkan bahwa Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak Daerah menurut UU No 28 Tahun 2009 dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pajak Provinsi yang terdiri dari

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Objek Pajak adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan

bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

d. Pajak Air Permukaan;

Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

e. Pajak Rokok

Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok. Rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

2. Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikankemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

b. Pajak Restoran

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah

jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

c. Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

d. Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Objek Pajak meliputi: Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya; Reklame kain; Reklame melekat, stiker; Reklame selebaran; Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; Reklame udara; Reklame apung; Reklame suara; Reklame film/*slide*; dan Reklame peragaan.

e. Pajak Penerangan Jalan

Lampu penerangan jalan adalah tanggung jawab Pemda setempat. Dalam hal ini PLN hanya bertugas untuk menarik pajak penerangan jalan (PPJ) untuk kemudian disetorkan ke Pemda dan mensuplai aliran listrik ke penerangan jalan tersebut..

f. Pajak Parkir

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

g. Pajak Air Tanah;

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah: Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

h. Pajak Sarang Burung Walet

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.

i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

b. Tarif Pajak

Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, menetapkan besar tarif pajak Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi;
2. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
3. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah;
4. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

b. Kepemilikan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor pribadi roda 2 (dua) 200 (dua ratus) cc ke atas dan roda 4 (empat) dikenakan tarif secara progresif, besarnya tarif sebagai berikut:

1. Kepemilikan kedua sebesar 2 % (dua persen);
2. Kepemilikan ketiga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen);
3. Kepemilikan keempat sebesar 3 % (tiga persen);
4. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen).

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

a. Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

1. Penyerahan pertama sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen);
2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

b. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut :

1. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

a. Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

4. Pajak Tarif Permukaan (PAP)

a. Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

5. Pajak Rokok

a. Pajak Rokok yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

c. Kriteria Memilih Pajak

Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan bahwa dalam mempertimbangkan pemungutan suatu pajak daerah, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, utamanya yield atau hasil yang diperkirakan dapat diperoleh dan pemenuhan unsur-unsur keadilan adalah sebagai berikut:

1. Kecukupan: hasil dari pajak harus sesuai dengan pengeluaran yang akan dibiayai. Beberapa pajak yang memberikan hasil kecil cenderung tidak efisien dan menciptakan resistensi dari wajib pajak
2. Kepastian dan dapat diprediksi: hasil dari pajak sebaiknya tidak mengalami fluktuasi yang besar dari tahun ke tahun, karena hal tersebut menyulitkan dalam perencanaan pengeluaran. Beberapa pajak atas produksi hasil pertanian kemungkinan sulit untuk diprediksi karena faktor iklim yang tidak menentu.
3. Elastisitas: idealnya, hasil dari pajak sebaiknya meningkat secara otomatis seiring dengan inflasi, pertumbuhan populasi dan meningkatnya pendapatan. Pajak penghasilan progresif elastis terhadap ketiga hal tersebut, sementara “poll tax” hanya elastis terhadap populasi dan tidak kepada dua aspek yang lain. Pajak “ad valorem” (yaitu, persentase pajak dari nilai objek pajak akan jauh lebih elastis dibandingkan dengan pajak yang jumlahnya tetap dalam bentuk nilai uang). Catatan yang perlu diingat bahwa: tarif pajak dapat ditingkatkan seiring dengan inflasi, dan apabila keputusan politik atau tindakan administrasi dibutuhkan maka hal tersebut tidak dapat terjadi secara otomatis.
4. Biaya pemungutan: rasio antara biaya pemungutan dan hasil dari pajak sebaiknya sekecil mungkin. Populasi penduduk dengan tingkat penyebaran yang luas, masalah transportasi dan infrastruktur menyebabkan biaya pemungutan di negara-negara berkembang menjadi tinggi. Hal ini

menyebabkan pajak atas kegiatan sektor informal menjadi mahal karena biaya pemungutan yang tinggi.

2.1.7 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui untuk penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah pemungutan atas pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber-sumber pendapatan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:
 - a. Hasil Pajak Daerah, menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - b. Hasil retribusi daerah, menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil pendapatan daerah dari keuntungan yang didapat dari perusahaan daerah yang dapat berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa jasa giro, penjualan aset tetap daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
2. Dana perimbangan berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 19 yaitu “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Tujuan dari dana perimbangan yaitu untuk mengurangi kesenjangan pada bagian fiskal yang terjadi antara pemerintah dan pemerintah daerah. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 159 sampai Pasal 162 menyebutkan bahwa dana perimbangan terdiri dari:
- a. Dana Bagi Hasil, bersumber dari hasil pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak yaitu: (1) Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, dan kehutanan. (2) Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. (3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam yaitu:

(1) Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusaha hutan (IHPH), provinsi sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (2) Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (3) Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusaha perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. (4) Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (5) Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (6) Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintahan, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

- b. Dana Alokasi Umum berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

- c. Dana Alokasi Khusus berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam UU No.32 Tahun 2004 Pasal 164 angka 1 menjelaskan bahwa pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

2.1.8 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Sadono Sukirno (2004), PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah atau propinsi. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (output) dikurangi dengan biaya antara (intermediate cost). Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing - masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan produk domestik regional bruto (PDRB).

Menurut salah satu sumber di BPS (2019), PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Hasil perhitungan PDRB biasa dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut penggunaan. PDRB menurut lapangan usaha merupakan total nilai tambah (value added) dari semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah dan pada periode waktu tertentu, sedangkan PDRB menurut penggunaan merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir.

Menurut Todaro, (2002), PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut). Seperti telah diuraikan di atas, angka pendapatan regional dalam beberapa tahun menggambarkan kenaikan dan penurunan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Kenaikan/penurunan dapat dibedakan menjadi dua faktor berikut:

- a. Kenaikan/penurunan riil, yaitu kenaikan/penurunan tingkat pendapatan yang tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan riil pendapatan penduduk berarti daya beli penduduk di daerah tersebut meningkat, misalnya mampu membeli barang yang sama kualitasnya dalam jumlah yang lebih banyak.
- b. Kenaikan/penurunan pendapatan yang disebabkan adanya faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan pendapatan yang hanya disebabkan inflasi (menurunnya nilai beli uang) maka walaupun pendapatan meningkat tetapi jumlah barang yang mampu dibeli belum

tentu meningkat. Perlu dilihat mana yang meningkat lebih tajam, tingkat pendapatan atau tingkat harga.

Oleh karena itu, untuk mengetahui kenaikan pendapatan yang sebenarnya (riil), faktor inflasi harus dikeluarkan terlebih dahulu. Pendapatan regional yang di dalamnya masih ada unsur inflasinya dinamakan pendapatan regional atas dasar harga berlaku.

Sedangkan pendapatan regional dengan faktor inflasi yang sudah ditiadakan merupakan pendapatan regional atas dasar harga konstan. Untuk mengetahui apakah daya beli masyarakat meningkat atau tidak, pendapatannya harus dibandingkan dalam nilai konstan. Dengan alasan inilah maka pendapatan regional perlu disajikan dalam dua bentuk, yaitu atas dasar harga yang berlaku dan atas dasar harga konstan.

Harga konstan artinya harga produk didasarkan atas harga pada tahun tertentu. Tahun yang dijadikan patokan harga disebut tahun dasar untuk penentuan harga konstan. Jadi, kenaikan pendapatan hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah fisik produksi, karena harga dianggap tetap (konstan). Akan tetapi, pada sektor jasa yang tidak memiliki unit produksi, nilai produksi dinyatakan dalam harga jual. Oleh karena itu, harga jual harus dideflasi dengan menggunakan indeks inflasi atau deflator lain yang dianggap lebih sesuai.

2.1.9 Penduduk

Penduduk dapat diartikan sebagai seluruh orang yang menempati suatu daerah atau negara. Banyaknya orang yang menempati suatu daerah atau negara

akan menentukan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk biasanya diukur dengan jumlah penduduk per kilometer persegi (Badan Pusat Statistik, 2018).

Penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan variabel-variabel tertentu, misalnya umur, jenis kelamin, agama, mata pencarian, bahasa, tempat tinggal, dan lain-lain. Salah satu pengelompokan yang paling sering digunakan adalah pengelompokan penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Pengelompokan penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya.

Mantra (2003) Menjelaskan mengenai komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin dapat ditampilkan dalam bentuk Piramida penduduk, yaitu grafik yang dibuat untuk mencerminkan data kependudukan menurut usia dan jenis kelamin. Penggambaran piramida penduduk dimulai dengan menggambarkan dua garis yang saling tegak lurus. Garis yang vertikal menggambarkan umur penduduk mulai dari nol lalu naik. Kenaikan ini dapat tahunan, dapat pula dengan jenjang lima tahunan.

2.2 Kajian Variabel Penelitian

2.2.1 Kinerja Penerimaan Pajak Daerah

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Hal ini

berarti bahwa kinerja (performance) adalah sebuah tindakan yang dapat dilihat, diamati serta dimungkinkan untuk mencapai hal-hal yang diharapkan (tujuan). Kinerja juga dapat dikatakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya yang diperoleh selama periode waktu tertentu (Hidayah, 2018).

Berdasarkan definisi mengenai kinerja organisasi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja organisasi merupakan hasil kerja organisasi ataupun gambaran mengenai apakah suatu organisasi telah dapat melaksanakan kegiatan/kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat oleh organisasi.

Rasio pengukuran kinerja penerimaan pajak daerah dalam penelitian ini yaitu menggukan:

a. Rasio Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Menurut Sulistiyanto (2018) untuk mengetahui besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) yaitu dengan membandingkan realisasi pajak daerah dengan realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah). Rasio ini yaitu bertujuan untuk membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah dengan realisasi penerimaan PAD.

b. Rasio Pertumbuhan Pajak Daerah

Rasio ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan suatu daerah serta dapat mempertahankan keberhasilan ditahun selanjutnya.

c. Rasio Efektifitas Pajak Daerah

Menurut Sulistiyanto (2018) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan yaitu semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan target penerimaan Pajak Daerah (dianggarkan).

2.2.2 Potensi Pendapatan Daerah

Menurut Mardiasmo dan Makhfatih (2000) potensi pendapatan daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber pendapatan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel-variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi), dan yang tidak dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel non-ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber pendapatan daerah.

Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Retribusi daerah, komponen lain yang juga termasuk komponen PAD, merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan

tertentu kepada penduduk mendiami wilayah yurisdiksinya. Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut (Riduansyah, 2003).

Beberapa indikator yang biasa digunakan untuk menilai Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu:

- 1) Hasil (*Yield*), yaitu memadai tidaknya suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagailayanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil pajak tersebut.
- 2) Keadilan (*Equity*), dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak harus adil secara horizontal, artinya beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Pajak harus adil secara vertical, artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar.
- 3) Efisiensi ekonomi. Pajak/retribusi daerah hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi.
- 4) Kemampuan untuk melaksanakan (*Ability to implement*), pajak harus dapat dilaksanakan baik dari aspek politik maupun administratif.

- 5) Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*Suitability as local evenue sources*), adanya kejelasan kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak hendaknya sama dengan tempat akhir beban pajak.

2.2.3 Proyeksi Pajak Daerah

Penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan yang utama dalam APBN. Selama lima tahun terakhir, penerimaan perpajakan rata-rata sekitar 70 persen dari total pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam membiayai APBN maupun APBD semakin besar. Peran pajak tersebut akan semakin besar untuk masa yang akan datang karena pemerintah ingin mengurangi peran utang dalam mendanai APBN dan APBD. Karena peranan pajak semakin penting, maka penerimaan perpajakan membutuhkan sistem pengelolaan yang semakin baik sehingga penerimaan perpajakan semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu perlu disusun suatu perencanaan angka target penerimaan perpajakan yang tepat dan optimal dengan menggunakan model proyeksi penerimaan perpajakan yang mampu menghasilkan angka proyeksi yang sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang dan akan terjadi, dan mampu menjelaskan pengaruh kebijakan pemerintah terhadap penerimaan perpajakan.

Beberapa model yang dipakai sebagai alat untuk menghitung target penerimaan perpajakan adalah: 1) Model Monitoring Penerimaan Perpajakan (Model bulanan); 2) Model target penerimaan perpajakan (Model tahunan); 3) Model Dampak Kebijakan terhadap Penerimaan Perpajakan; 4) Model

Perhitungan Potensi Penerimaan Perpajakan; dan 5) Model target penerimaan perpajakan per sektor. Dalam rangka menghasilkan angka target yang lebih realistis, terus dilakukan upaya penyempurnaan dan pengembangan terhadap kelima model tersebut.

Upaya penyempurnaan dilakukan melalui update data base dan perbaikan tampilan. Salah satu contoh adalah model monitoring penerimaan perpajakan (model bulanan) yang mengalami penyempurnaan berupa: (1) mempermudah dalam memasukan data realisasi yang terbaru; (3) merubah tampilan tabel dan grafik untuk menganalisa perkembangan realisasi; (4) memasang “tombol cepat” untuk merubah tampilan tabel dan grafik; serta (5) menyajikan perbandingan data perkembangan realisasi penerimaan perpajakan dan perkembangan kondisi perekonomian sebagai alat bantu dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan perpajakan.

2.2.4 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah, apabila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bertambah atau mengalami kenaikan akan menyebabkan kenaikan akan menyebabkan penerimaan pajak daerah meningkat *ceteris paribus* (Lumy, dkk, 2018). Apabila terjadi penambahan PDRB, maka semakin tinggikemampuan seseorang untuk membayar pajak (*ability to pau*) antara lain pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Nurrohman (2010) yang mengatakan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Teori mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat PDRB berarti bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat dan akan semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah. Arianto (2014) yang menyatakan bahwa berarti PDRB merupakan indikator dalam mengukur tingkat perekonomian suatu daerah dalam peningkatan penerimaan Pajak Daerah.

2.2.5 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Apabila jumlah penduduk bertambah atau mengalami kenaikan maka akan membuat penerimaan pajak daerah meningkat pula, begitupun sebaliknya *ceteris paribus* (Lumy, dkk, 2018).

Teori Hansen mengenai stagnasi (*secularstagnation*) menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif terutama investasi. Penduduk tidak selalu menjadi penghambat pembangunan ekonomi suatu daerah. Jika tingkat perkembangan penduduk tinggi maka untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan akan tinggi pula. Berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi. Dalam penelitian Lumy (2018) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dan penelitian yang dilakukan Arianto (2014)

menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

1	Nama	Mohammad Riduansyah (2003)
	Judul	Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)
	Metode Penelitian	Memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dari berbagai sumber data baik primer maupun sekunder
	Hasil Penelitian	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993/1994 – 2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 1993/1994 – 2000 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya. Sedangkan pendapatan yang berasal dari komponen retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, memberikan kontribusi rata-rata pertahunnya sebesar 15,61% dengan rata-rata

		pertumbuhan pertahunnya sebesar 5,08% per tahun.
2	Nama	Baihaqi (2011)
	Judul	Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu
	Metode Penelitian	Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif, dengan menghitung kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, dan pertumbuhan PAD dan Pendapatan Daerah
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu periode 2005-2008 adalah 29.86%. Kontribusi komponen PAD terhadap total PAD Provinsi Bengkulu periode 2005-2008 masing-masing adalah: pajak daerah 69.48%, retribusi daerah 18.25%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 3.03%, dan lain- lain PAD yang sah 9.24%. Kontribusi komponen PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu periode 2005-2008 masing-masing: pajak daerah 20.51%, retribusi daerah 5.56%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 0.91%, dan lain- lain PAD. Tingkat pertumbuhan PAD dan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu periode 2005-2008 masing-masing adalah 23.96% dan 51.38%
3	Nama	Nurhayati (2015)
	Judul	Analisis Potensi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu
		Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif , menggunakan data primer dan data sekunder

	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu periode 2005-2008 adalah 29.86%. Kontribusi komponen PAD terhadap total PAD Provinsi Bengkulu periode 2005-2008 masing-masing adalah: pajak daerah 69.48%, retribusi daerah 18.25%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 3.03%, dan lain- lain PAD yang sah 9.24%. Kontribusi komponen PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu periode 2005-2008 masing-masing: pajak daerah 20.51%, retribusi daerah 5.56%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 0.91%, dan lain- lain PAD. Tingkat pertumbuhan PAD dan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu periode 2005-2008 masing-masing adalah 23.96% dan 51.38%
4	Nama	Ering Sherly, dkk (2017)
	Judul	Analisis Potensi Pajak Daerah untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara
	Metode Penelitian	Metode dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder
		Penelitian ini menemukan bahwa pendapatan per kapita, share sektor pertanian, dan jumlah siswa sekolah menengah atas merupakan faktor-faktor yang berperan penting dalam memengaruhi penerimaan pajak daerah di kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Utara. Ditemukan juga adanya gap yang cukup lebar antara pusat kota provinsi dengandaerah lainnya. Perhitungan potensi pajak restoran menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak restoran yang selama ini diterima oleh pemerintah daerah masih berada di bawah nilai potensi pajak yang dimiliki oleh

		daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan menentukan potensi riil pajak daerah masih perlu ditingkatkan. Hasil regresi menunjukkan pembangunan ekonomi yang diproksi oleh pendapatan per kapita memiliki nilai elastisitas yang lebih besar dibandingkan variabel lain. Dengan demikian, peningkatan dalam pendapatan per kapita akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah.
5	Nama	Nusa Agustinus, dkk (2016)
	Judul	Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Yahukimo
	Metode Penelitian	Metode penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan-keterangan terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Yahukimo.
	Hasil penelitian	Berdasarkan potensi hasil dan atau kemampuan untuk dilaksanakan terdapat 2 (dua) pajak dan retribusi yang tidak berpotensi yaitu Retribusi Parkir Bandara, dan Retribusi Peredaran Hasil Hutan. Sedangkan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Ijin Ganggana pada Variabel Kemampuan Melaksanakan tergolong berpotensi, namun pada variabel hasil tidak berpotensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah adalah perkembangan demografi, seperti jumlah penduduk, jumlah pemilik usaha, fasilitas dan kesadaran membyar pajak dan retribusi.
6	Nama	Adi Sulistiyanto(2018)

	Judul	Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
	Metode Penelitian	Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan, memperjelas, menganalisa dan menginterpretasi data yang diperoleh, dengan mengidentifikasi efektivitas pajak dan retribusi, mengidentifikasi efisiensi pajak dan retribusi serta menghitung kontribusi pajak daerah dan retribusi.
	Hasil Penelitian	Hasil ini menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2010-2014 mengalami peningkatan rata-rata 14,42% per tahun, retribusi efektifas selama periode 2010 hingga 2014 pada tabel 5 rata-rata tingkat efektivitas 12,60% Berdasarkan kriteria efisiensi yang digunakan, menunjukkan bahwa DPPAD Provinsi Jawa Tengah telah melakukan dengan manajemen yang sangat efisien, itu berarti bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar daripada jumlah biaya yang dikeluarkan selama periode 5 tahun, tingkat efisiensi rata-rata pajak daerah Pendapatan sebesar 0,076%, kontribusi rata-rata pajak daerah ke PAD untuk jangka waktu 5 tahun ke bawah kisaran harga rata-rata 4,42%, dan rata-rata kontribusi retribusi ke PAD untuk jangka waktu 5 tahun sebesar 0,0699%. Berdasarkan temuan ini, saran yang dapat diajukan diperlukan untuk meningkatkan pengawasan, pengawasan, dan evaluasi pengumpulan pajak dan pungutan lokal untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah yang berkontribusi pada PAD.
7	Nama	Muhammad Syafrudin Hali (2016)
	Judul	Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari
	Metode Penelitian	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dan kuantitatif

		analisis.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD terbesar yaitu lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar 41,77% per tahun dan Pajak Daerah sebesar 37,92% per tahun, sedangkan kontribusi PAD terbesar yaitu Pajak daerah sebesar 40,68% per tahun dan Retribusi Daerah sebesar 36,14% per tahun.
8	Nama	Bagijo, Estu, Himawan (2011)
	Judul	Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/ Kota Dan Pemerintah Propinsi Di Jawa Timur)
	Metode Penelitian	Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menghitung pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan Daerah, pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah,
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posisi Pajak dan Retribusi Daerah sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah (baik kabupaten/kota maupun propinsi) khususnya sebagai indikator keberhasilan otonomi daerah dengan aspek kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan urusan wajibnya.
9	Nama	Buettner (2006)
	Judul	The Incentive Effect Of Fiscal Equalizationtransfers On Tax Policy
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan adanya efek insentif yang signifikan dari transfer pemerataan fiskal, implikasi kesejahteraan tidak jelas. Jika elastisitas basis pajak sehubungan dengan tarif pajak terutama mencerminkan realokasi modal di dalam negara, mungkin saja insentif yang diciptakan oleh sistem pemerataan fiskal benar-benar mengembalikan optimalisasi terbaik pertama, namun jika eksternalitas lokal dari

		<p>persaingan pajak lemah, dan jika ada inefisiensi penting dalam sektor publik, sistem pemerataan fiskal cenderung membuat pemerintah kota menetapkan tarif pajak terlalu tinggi. Salah satu cara yang mungkin untuk mengatasi pertanyaan sulit ini di penelitian selanjutnya adalah bertanya apakah pemerintah negara bagian memiliki insentif yang tepat untuk secara optimal menyusun sistem pemerataan fiskal atau apakah mereka mengejar tujuan alternatif.</p>
10	Nama	Turyna, Monika K dan Hans Pitlik(2017)
	Judul	Do equalization payments affect subnational borrowing? Evidence from regression discontinuity
	Metode Penelitian	Menggunakan literatur singkat, gambaran pengaturan kelembagaan Austria dan Hipotesis utama, menyajikan data yang digunakan dan strategi empiris
	Hasil Penelitian	Austria sangat tersentralisasi federasi di mana otonomi pajak di tingkat kota agak lemah. Didasarkan pada diskontinuitas yang disebabkan oleh peraturan unik dari bobot populasi di perjanjian pembagian pajak antara pemerintah pusat dan kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sesuai dengan harapan teoretis, kota-kota dengan ketergantungan pendapatan yang lebih tinggi adalah bertanggung jawab atas pinjaman bersih per kapita yang lebih tinggi. Ukuran efek pinjaman tambahan sama dengan sekitar 5% dari utang kota rata-rata. Peneliti juga menemukan bahwa hampir setengah dari yang diamati diskontinuitas bekerja melalui saluran investasi.
11	Nama	Yuliandari, Rini, dkk (2017)
	Judul	The Analysis of Effectivity and Efficiency of Tax Collection from Hotels and Restaurants in Order to Increase the Original Regional Income (PAD)

		in Mataram
	Metode Penelitian	Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif untuk studi kasus sebagai pengumpulan data.
	Hasil Penelitian	Hasil menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak dari hotel dan restoran di Mataram dianggap dalam kategori efektif dan efisien. Sementara itu, kontribusi pengumpulan pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah adalah 0,27% dan 0,13% terhadap PAD, dengan demikian pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi yang baik terhadap penerimaan pajak daerah dan PAD di Mataram. Selain itu, kinerja hotel dan pajak restoran dalam kategori berkembang.
12	Nama	Irigat, Raed A.M (2016)
	Judul	GDP and Tax Revenues-Causality Relationship in Developing Countries: Evidence from Palestine
	Metode Penelitian	Penelitian ini berdasarkan empiris pendekatan menggunakan data sekunder dari otoritas moneter Palestina selama (1999-2014).
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwadampak variabel makro-ekonomi pada penerimaan pajak dan korelasi antara variabel dependen dan independen berubah dari satu tahap ke tahaplainnya. Sehingga disimpulkan bahwa otoritas Palestina harus memotivasi kondisi investasi dan meningkatkan pajak instrumen penagihan dan mengurangi invasi pajak. Selain itu, pemerintah Palestina harus merasionalisasi pengeluaran konsumsi pemerintah dan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan.
13	Nama	Hakim, Taufik Abdul
	Judul	The Impact and Consequences of Tax Revenues' Components on Economic Indicators: Evidence

		from Panel Groups Data
	Metode Penelitian	Metode yang digunakan menggunakan analisis Group data panel
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Total penerimaan Pajak Daerah terhadap PDRB lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan tinggi dibandingkan dengan negara-negara rendah dan menengah. 2. Tingkat inflasi di suatu negara signifikan dan secara langsung mempengaruhi komponen pajak pendapatan, terutama pajak atas barang dan jasa. Tingkat inflasi yang lebih tinggi dan rendah, serta negara-negara berpenghasilan menengah memiliki presentase atas barang dan jasa tertinggi terhadap total pendapatan pajak perbandingan. 3. Pajak atas penghasilan, laba, dan capital gain (IPCT) akan memberikan kontribusi lebih pada total pajak pendapatan di negara-negara berpenghasilan tinggi.
14	Nama	Susena, Karona Cahya, dkk (2015)
	Judul	Model Proyeksi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Bengkulu
	Metode Penelitian	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.. dengan menggunakan metode Trend Least Square. Yang digunakan untuk menetapkan target tahun 2016 -2020
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Trend Least Square lebih tepat digunakan untuk menetapkan target tahun 2016 - 2020, dimana perhitungan trend Least Square untuk pajak kendaraan bermotor pada tahun 2016 sebesar Rp. 176.189.057.021 dan selalu meningkat tiap tahunnya sampai tahun 2020 sebesar Rp. 207.685.219.438. Untuk Penerimaan Bea balik nama pada tahun 2016 sebesar Rp. 176.334.894.949 dan tahun 2020

		<p>sebesar Rp. 197.897.953.080.</p> <p>2. Dengan ke 3 (tiga) metode yaitu Metode Moment , Metode Least Square dan trend kuadratik yang menunjukkan trend meningkat dari tahun 2016-2020, hal ini menunjukkan bahwa sumber PAD yang potensial diharapkan untuk Provinsi Bengkulu.</p>
15	Nama	Kannapadang, Ruben S. (2015)
	Judul	Proyeksi Potensi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Toraja Utara Periode 2015 S/D 2019
	Metode Penelitian	Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah forecasting, dengan teknik analisis regresi linear sederhana, dan menggunakan data historis penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Toraja Utara 5 tahun sebelumnya.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan daerah dari sumber pajak daerah naik sebesar 1,16% dan retribusi daerah sebesar 1,52%. Penelitian ini mengacu pada asumsi ceteris paribus, yang artinya bahwa keadaan masa lalu akan berulang tanpa perubahan pada masa yang akan datang.
16	Nama	Denny George Lumy, Paulus Kindangen, Daisy S.M. Engka (2018)
	Judul	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
	Metode Penelitian	Menggunakan metode analisis table dan analisis kuantitatif berupa metode regresi linear berganda. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program Microsoft Excel 2013 dan Eviews 0.8
	Variabel Penelitian	Y = Pajak Daerah

		<p>X1= Jumlah Penduduk</p> <p>X2= PDRB</p> <p>X3= Inflasi</p>
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Sulawesi Utara. 2. PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Sulawesi Utara. 3. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Sulawesi Utara.
17	Nama	Puspita Suci Arianto (2014)
	Judul	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Surabaya
	Metode Penelitian	penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda (Multiple Linier Regression Method) dengan metode kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square (OLS)
	Variabel Penelitian	<p>Y = Pajak Daerah</p> <p>X1= Jumlah Penduduk</p> <p>X2= PDRB</p> <p>X3= Inflasi</p>
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. ini terkait dengan jumlah penduduk sebagai subjek pajak akan mengeluarkan penghasilannya untuk membayar pungutan pajak atas jasa timbal balik terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. 2. variabel Inflasi tidak berpengaruh signifikan dan juga berpengaruh negatif terhadap Pajak Daerah. ketika harga barang naik atau turun, tidak mengurangi kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. 3. variabel PDRB mempunyai pengaruh yang

		positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika sektor-sektor pembentuk PDRB naik, maka penerimaan pajak daerahpun naik.
18	Nama	Carly M. Mongdong, dkk (2018)
	Judul	Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Infrastruktur terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon
	Metode Penelitian	Metode yang digunakan analisis tabel dan deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Pengolahan menggunakan program <i>Microsoft Excel 2013</i> dan <i>Eviews 0.8</i>
	Variabel Penelitian	Y = Pajak Daerah X1= PDRB X2= Jumlah Penduduk X3= Infrastruktur
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon. Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon. Infrastruktur tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon. Hasil pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Infrastruktur secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon. Nilai F table berdasarkan besarnya $\alpha=5\%$ dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator $(K-1/3-1)= 2$ dan df untuk denominator $(n-k/12-3)= 9$. Nilai F-statistik yang diperoleh 23.71 sedangkan F-tabel 4.26 dan nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari tingkat $\alpha (0,01)$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB, Jumlah Penduduk dan Infrastruktur secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Penerimaan Pajak

		Daerah di Kota Tomohon.
19	Nama	Hidayati Sania, dkk (2018)
	Judul	Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah
	Metode Penelitian	Metode penelitian dengan analisis deskriptif kuantitatif. Teknik pengolahannya menggunakan analisis regresi linier berganda dengan perhitungan program SPSS
	Variabel Penelitian	Y = Pajak Daerah X1= PDRB X2= Jumlah Penduduk
		Hasil penelitian ini di hipotesis pertama menunjukkan jumlah populasi, produk domestik bruto dan Inflasi berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah dengan tingkat signifikansi 0,000. Hipotesis kedua menunjukkan jumlah populasi berpengaruh secara parsial pajak daerah dengan signifikansi pada tingkat 0,001. Hipotesis ketiga menunjukkan produk domestik bruto memiliki pengaruh sebagian terhadap penerimaan pajak daerah dengan signifikansi pada level 0,000. Hipotesis keempat menunjukkan inflasi tidak berpengaruh secara parsial pajak daerah dengan signifikansi pada tingkat 0,915.
20	Nama	Lulu Chodlirotul Arofah (2018)
	Judul	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah
	Metode Penelitian	Metode penelitian yang digunakan yaitu dekriptif kuantitatif. Menggunakan analisisuji asumsi klasik dan regresi linier berganda

	Variabel Penelitian	Y= Pajak Daerah X1= Pendapatan Perkapita X2= Jumlah Penduduk X3= Jumlah Hotel X4= Jumlah Indutri
	Hasil Penelitian	1. Ada Pengaruh positif dan signifikan pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak daerah 2. Ada pengaruh negatif dan signifikan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah 3. Tidak ada pengaruh positif dan signifikan jumlah hotel terhadap penerimaan pajak daerah 4. Ada pengaruh positif dan signifikan jumlah industri terhadap penerimaan pajak daerah

Tabel 2.1 daftar penelitian terdahulu menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang pernah dilakukan. Secara umum persamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kinerja dari penerimaan pajak daerah yaitu menganalisis kontribusi, pertumbuhan dan efektifitas pajak daerah, tipologi penerimaan pajak daerah, proyeksi pajak daerah serta pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, serta tahun penelitian yaitu tahun 2013-2018. Perbedaan lain terletak pada jenis pajak daerah yang diteliti yaitu 5 jenis pajak daerah Provinsi antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik

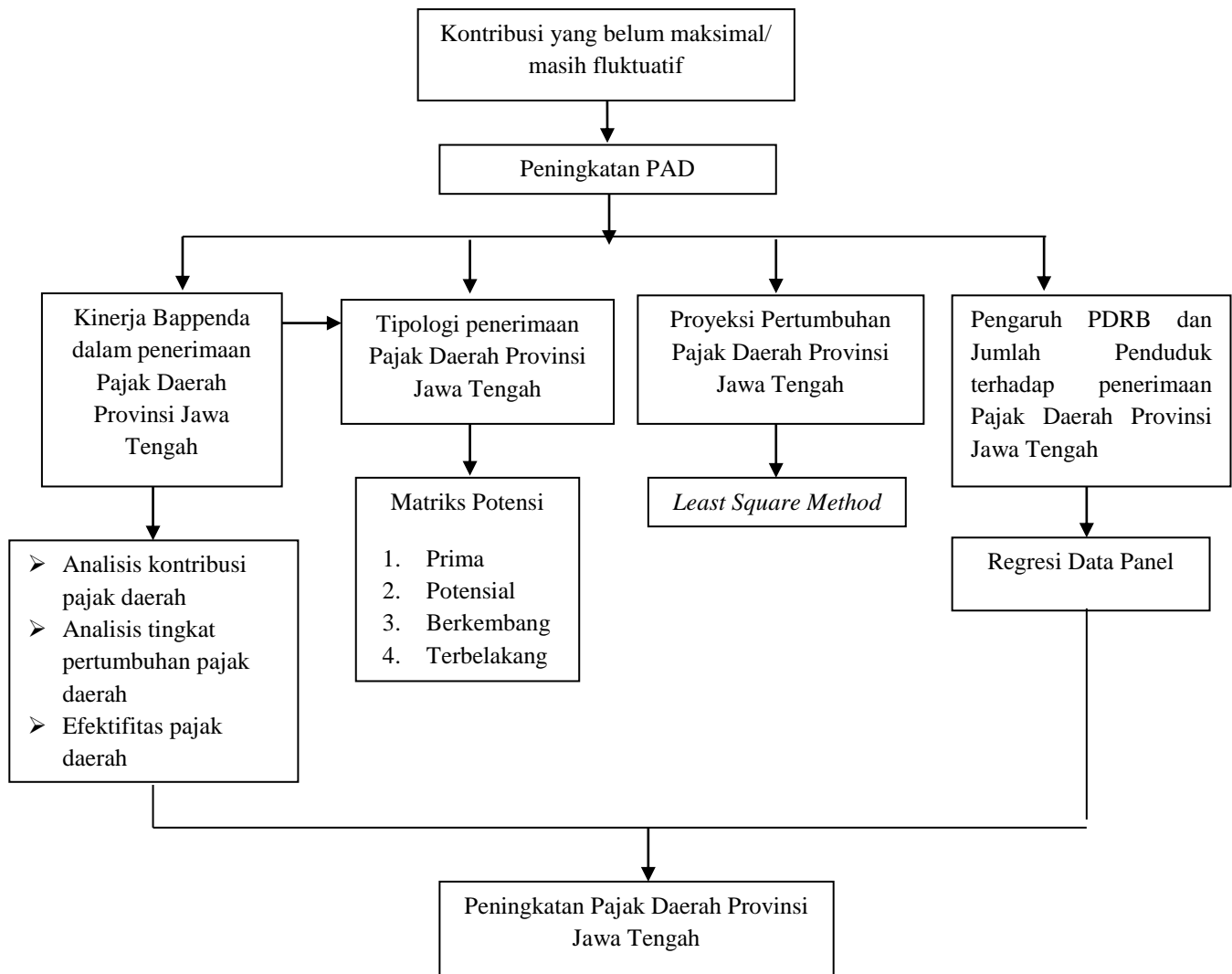
Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

2.4 Kerangka Berpikir

Kontribusi Pajak Daerah yang belum maksimal atau masih pada pendapatan daerah menjadi salah satu masalah dalam penelitian ini, maka diharapkan adanya peningkatan PAD melalui proyeksi pertumbuhan pajak daerah dan tipologi penerimaan pajak daerah menggunakan matriks potensi.

Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dalam penerimaan Pajak Daerah pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik analisis antara lain, analisis tingkat kontribusi daerah, analisis tingkat pertumbuhan pajak daerah, efektifitas pajak daerah. Kemudian tipologi penerimaan Pajak Daerah menggunakan Matriks potensi dari hasil kinerja Bappenda dalam penerimaan pajak daerah. Sementara proyeksi pertumbuhan pajak daerah ini menggunakan analisis kuadrat terkecil (*Least Square*), kemudian untuk meneliti pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap penerimaan pajak daerah analisis regresi data panel.

Dengan ketiga teknik analisis data tersebut maka diharapkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak daerah, dengan adanya peningkatan pajak daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga diharapkan Jawa Tengah dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan memaksimalkan potensi daerah yang ada. Maka dari itu kerangka berpikir akan digambarkan seperti pada gambar 2.1



Gambar 2. 1 Kerangka Bepikir

2.5 Hipotesis Penelitian

Definisi Hipotesis menurut Sekaran (2005) adalah hubungan peramalan yang logis antara dua variabel atau lebih yang diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diuji. Hipotesis merupakan dugaan awal mengenai jawaban dari rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, untuk menjawab

pertanyaan penelitian pengaruh PDRB dan Jumlah Penduuk terhadap penerimaan pajak daerah, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₀ :Variabel PDRB AHK berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah.

H₁ :Variabel PDRB AHK tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah.

H₀ :Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah.

H₁ :Variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi agregat Pajak Daerah dan per jenis Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 cenderung mengalami fluktuatif. Kontribusi agregat Pajak Daerah tertinggi ada pada tahun 2017, yaitu sebesar 84,26%. Rata-rata kontribusi per jenis Pajak Daerah tertinggi ada pada Pajak Kendaraan Bermotor yaitu sebesar 28,79 %. Pertumbuhan agregat Pajak Daerah dan per jenis Pajak Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 mengalami fluktuatif. Pertumbuhan agregat Pajak Daerah tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 22,29%. Rata-rata pertumbuhan per jenis Pajak Daerah tertinggi ada pada Pajak Kendaraan Bermotor yaitu sebesar 13,17%. Tingkat efektifitas agregat Pajak Daerah dan per jenis Pajak Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 mengalami fluktuatif. Tingkat efektifitas agregat Pajak Daerah tertinggi ada pada tahun 2013 yaitu sebesar 111,6%. Rata-rata tingkat efektifitas tertinggi per jenis Pajak Daerah ada pada Pajak Rokok yaitu sebesar 117,99%.
2. Tipologi penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 yang memiliki kategori Prima yaitu Pajak Kendaran Bermotor, Kemudian dalam kategori potential yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, selanjutnya dalam kategori berkembang yaitu Pajak Rokok, dan yang termasuk

dalam karegori terbelakang yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan.

3. Proyeksi penerimaan agregat Pajak Daerah dan per jenis Pajak Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2024 dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (*Least Square*), menyatakan bahwa penerimaan agregat Pajak Daerah dan per jenis Pajak Daerah tahun 2019-2024 mengalami peningkatan. Adanya peningkatan tersebut dikarenakan trend realisasi yang cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2013-2018.
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018. Jumlah penduduk tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018.

1.2 Saran

Saran yang penulis berikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan Pajak Daerah antara lain:

1. Kontribusi, pertumbuhan dan efektifitas pajak daerah mengalami fluktuatif di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari setiap jenis pajak daerah agar mengalami peningkatan yaitu dengan melakukan perhitungan potensi setiap jenis pajak daerah, karena berdasarkan pengamatan di lapangan penetapan target pendapatan setiap jenis pajak daerah masih dilakukan secara incremental sehingga belum menggambarkan potensi yang sebenarnya.

2. Berdasarkan Pengelolaan sumber pendapatan daerah seperti Pajak Daerah perlu diidentifikasi karena ada beberapa potensi pajak daerah provinsi yang belum dikelola secara tepat, serta perlu adanya pengawasan yang belum efektif oleh pemerintah sehingga dalam pemungutan penerimaan pajak dapat maksimal.
3. Pemerintah Jawa Tengah perlu meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana untuk menunjang penerimaan pajak daerah, sehingga mempengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak serta dapat meningkatkan PAD khususnya sektor pajak daerah.
4. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Agar lebih signifikan perlu lebih ditingkatkan sektor-sektor Produk Domestik Regional Bruto baik yang berhubungan langsung maupun tidak yang berhubungan dengan penerimaan pajak. Sehingga dapat menarik investor untuk membangun usaha di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, diharapkan pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat memajukan kesejahteraan penduduk dengan mengurangi pengangguran agar masyarakat dapat lebih produktif dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Puspita Suci. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Surabaya". *JIRA* Vol.3 No.1. 2014 hal 1-14.\
- Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.2019. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah*
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2010-2017*
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2010-2017*.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. *Jawa Tengah dalam Angka 2015*.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL–UGM, 1991, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, Jakarta.
- Bagijo, Estu,Himawan. 2011. Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/ Kota Dan Pemerintah Propinsi Di Jawa Timur). *Jurnal Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan*. Vol XVI, No. 1 Edisi Januari.
- Baihaqi.2011. Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu. *Jurnal Akuntansi* Vol. 1 No. 3 (2011): 246-266.
- Buettner, Thiess. 2006. The Incentive Effect of Fiscal Equalization Transfers on Tax Policy. *Journal of Public Economics* 90 pp 477-497.
- Caprioli, F. 2011. Optimal Fiscal Policy Under Learning. *Journal of Economic Dynamics & Control* 58 pp 101–124.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2017.
- Ering Sherly. 2016. Analisis Potensi Pajak Daerah untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol. 17 No. 1 Juli 201: 75-87.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonomi Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.

- Hali, Syafrudin, Muhammad. 2016. Potensi Pajak dan retribusi Daerah Kota Kediri. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*. Vol. 1, No. 1.
- Hidayah, etyaning Dewi. 2018 Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Iriqat, Raed A.M. (2016). GDP and Tax Revenues-Causality Relationship in Developing Countries: Evidence from Palestine. *International Journal of Economics and Finance*. Vol.8, No. 2.
- Kannapadang, R. S. (2015). Proyeksi Potensi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Toraja Utara Perode 2015 s/d 2019. *Ekosaint*, vol.1 no. 1.
- Khusaini, Muhammad Dr. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. BPFE Universitas Brawijaya. Malang.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Lumy George, dkk. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol. 19, No.6 2018.
- Mantra, Ida Bagus. 2003. *Demografi Umum*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Pustaka.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Mardiasmo dan Makhfatijh, Ahmad. 2000. *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang*. Laporan Akhir, Kerjasama Pemerintah Daerah Magelang dengan PAU-SE UGM, Yogyakarta.
- Mongdong, M.Cerly, dkk. 2018. Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Infrastruktur terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol 18 No.05 2018.
- Mukhlis, Imam dan Simanjuntak. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Penerbit Raih Asa Sukses.
- Nurhayati. 2015. Analisis Potensi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomi* Vol. 4, No. 2, Juli 2015.
- Nusa Agustinus, dkk. 2014. Potensi Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten di Yahukimo. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol. 2 No. 3.

- Pemerintah Jawa Tengah. 2017. *Perda Provinsi Jawa Tengah No 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah*.
- Riduansyah, Muhammad. 2003. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). Makara, Sosial Humaniora, Vol. 7, No. 2, Desember 2003.
- Rangkuti, Freddy. 2008. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sadono. Sukirno. 2004. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sania, Hidayati, dkk. 2018. Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk domestik Regional Bruto dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Permana*. Vol. IX No.2, 2 Pebruari 2018.
- Sasana, Hadi. 2006. *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor.: Penerbit Ghalia Indonesia
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sidik, Machfud. 2011. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*. Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta, 13 Maret 2002.
- Sulistiyanto, Adi. 2018. Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Efficient Indonesian Journal of Development Economics*. Vol 1 (3) 2018.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. Alfabeta CV.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Prakteknya*. Jakarta: Usaha Keluarga.
- Susanawati, Ferry, I Wayan Suparta & Muhammad Husaini. 2014. Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Metro. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* -Vol. 3, No 3, Nopember 2014.
- Susena, Karona Cahya. 2015. Model Proyeksi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Bengkulu. *Ekombis Review*.

- Suwarno, Agus Endro & Suhartiningsih. 2008. Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* . Vol. 7, No 2, September 2008.
- Thamrin Simanjuntak. 2001, *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Todaro, Michael P dan Slephan C. Smith. 2010. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Legalitas.
- Wahyuni, 2009. Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah. *The 3rd National Conference UKWMS*. Surabaya, October 10th 2009.
- Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*. Jakarta: Ekonosia.
- Winarno, Wing Wahyu. 2015. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Edisi 4, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Yuliandri, Rini, etc. 2017. The Analysis of Effectivity and Efficiency of Tax Collection from Hotels and Restaurants in Order to Increase the Original Regional Income (PAD) in Mataram. *Jurnal ekonomi Pembangunan*. Vol 9, No 2.